

Jurnal Dakem

Pendidikan dan Humaniora

Vol. V No. 1, Januari - Juni 2013

HAKIKAT PENDIDIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

**MENGGALI HISTORIS MASJID RAYA SULAIMANIYAH
KEC. PERBAUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**MEMBANGUN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN DAN
PEMBELAJARAN BERBASIS ILMU PENDIDIKAN**

MERETAS IDEOLOGI KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN

KEPEMIMPINAN DALAM PRESPEKTIF FIQH

GROUNDED RESEARCH

**FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENINGKATKAN HASIL
BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN STRATEGI
PEMBELAJARAN KOOPERATIF**

**ALIRAN-ALIRAN FILSAFAT PENDIDIKAN:
PROGRESIVISME, PERENNIALISME DAN ESENSIALISME**

**PERANAN KONSELOR DALAM PELAKSANAAN
BIMBINGAN**

**PENGEMBANGAN KURIKULUM INTEGRATIF
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH MENUJU
PEMBELAJARAN EFEKTIF: SEBUAH ANALISIS**

Jurnal Pakem

Pendidikan dan Humaniora

Volume V Nomor 1, Januari – Juni 2013

Penanggung Jawab	:	Asrul Daulay
Ketua Penyunting	:	Usiono
Sekretaris Penyunting	:	Sapri
Penyunting Pelaksana	:	Abdillah Salamuddin Retno Sayekti
Penyunting Ahli	:	Haidar Daulay (IAIN SU Medan) Dja'far Siddik (IAIN SU Medan) Syaiful Achyar (IAIN SU Medan) Hasan Asari (IAIN SU Medan) Fachruddin (IAIN SU Medan) Masganti Sit. (IAIN SU Medan) Indra Jaya (IAIN SU Medan) Slamet Triono Ahmad (UNIMED) Khairil Ansari (UNIMED) Popi Fuadah (Univ. Persada Indonesia) Fachruddin (Iniversitas Negeri Jakarta) Adji Samekto (Undip Semarang)
Tata Usaha	:	Haidir Salim

DAFTAR ISI

Hakikat Pendidik Dalam Pendidikan Islam Abdillah	1
Menggali Historis Masjid Raya Sulaimaniyah Kec. Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Achiriah	23
Membangun Paradigma Baru Pendidikan dan Pembelajaran Berbasis Ilmu Pendidikan Amiruddin Siahaan dan Nurhidayah ✓	40
Meretas Idiologi Kekerasan Dalam Pendidikan Haidir	62
Kepemimpinan Dalam Prespektif Fiqh Bukhari Muslim Nasution	73
<i>Grounded Research</i> Indra Jaya	89
Faktor-Faktor Yang Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Strategi Pembelajaran Kooperatif Wahyudun Nur Nasution	98
Aliran-Aliran Filsafat Pendidikan: Progresivisme, Perennialisme dan Esensialisme Usiono	112
Peranan Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Yenti Arsini	128
Pengembangan Kurikulum Integratif Pendidikan Dasar dan Menengah Menuju Pembelajaran Efektif: Sebuah Analisis Yusuf Hadijaya	137

MEMBANGUN PARADIGMA BARU PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN BERBASIS ILMU PENDIDIKAN

Amiruddin Siahaan dan Nurhidayah

Abstract

Educational problems that emerge at this moment is very difficult to be solved because they are not not solved with comprehending method and not proper instruments. In fact, Proper instruments to solve the educational problems should be with science of education.

Educational science has power to solve educational problems. Educational science with instruments in it has procedural steps, so whatever the educational problems can be done by educational science.

Kata Kunci: Paradigma Baru Pendidikan, Pembelajaran, Ilmu Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, masalah pendidikan atau hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan sangat banyak sehingga mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan mulai dari dasar hingga ke perguruan tinggi mengalami berbagai masalah, baik terkait dengan kurikulum, manajemen, evaluasi, pembiayaan, sistem pengelolaan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dan lain sebagainya.

Keadaan ini memaksa semua pihak memberikan masukan menurut paradigma masing-masing. Paradigma yang dikemukakan ada yang sesuai dengan kebutuhan perbaikan dan perubahan pendidikan dan pembelajaran, tetapi ada juga yang kurang sesuai, bahkan adakalanya masukan itu sama sekali tak sesuai dengan tujuan perubahan dalam rangka mencapai proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Situasi ini menjadikan masalah pendidikan menjadi

tidak menentu dan juga rancu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara nasional.

Kegaduhan pemikiran tentang pendidikan ini, terjadi karena adanya ketidakpuasan dikalangan pemangku kepentingan pendidikan (*stakeholders*), dan juga karena penglihatan yang nyata bahwa proses dan produk pendidikan di anggap tidak sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan tadi. Keadaan ini tentu saja mengakibatkan berbagai pihak, atau kalangan melakukan protes dengan berbagai cara sesuai dengan karakter pribadi atau lembaga yang memberikan protes tersebut

Persoalan pendidikan bukanlah hanya masalah pribadi, pendidikan menyangkut atau terkait dengan berbagai persoalan kehidupan manusia. Pendidikan bagaimanapun ditengarai memiliki kemampuan untuk merubah diri seserorang, suatu komunitas atau masyarakat, masyarakat yang telah membangun, dan juga dunia serta isi alam jagat raya ini. Karenanya, berbagai pihak wajar saja memberikan reaksi, baik reaksi seadanya sampai yang secara ekstrim jika pendidikan dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang dilihat dan diharapkannya.

Merujuk kepada berbagai reaksi yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan, sewajarnya pula secara proporsional harus diberikan tanggapan yang bersifat terbuka oleh penyelenggara dan penanggungjawab pendidikan, untuk memberikan penjelasan sekaligus melakukan dialog yang bersifat dialogis untuk melakukan pembenahan dalam memperbaiki pendidikan jika dianggap hal itu merupakan sebuah keniscayaan untuk diperbaiki.

Arah yang dituju untuk merubah pendidikan tentu saja dilakukan setelah melakukan telaah terhadap saran, kritik, reaksi dari masyarakat pemangku kepentingan. Setelah hal itu dilakukan identifikasi dengan tepat, jujur, dan adil, selanjutnya dilakukan diagnosis, prognosis, dan juga evaluasi sehingga diperoleh suatu perbaikan yang mendasar dan mendalam dalam rangka mencapai proses pendidikan yang tepat dan benar, dan juga hasil pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran, sereta secara simultan akan meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif.

Melakukan perbaikan proses dan penyelenggaraan pendidikan, dilakukan bukan hanya berdasarkan sebagaimana harusnya, tetapi juga dilakukan berdasarkan pendekatan keilmuan yang menjadi basis

pendidikan itu sendiri. Karenanya, ilmu pendidikan haruslah menjadi dasar berpijak dalam melakukan perbaikan proses pendidikan. Memerbaiki pendidikan haruslah berbasis ilmu pendidikan. Tidak akan terjadi perbaikan yang pendidikan secara mendasar jika mengabaikan ilmu pendidikan sebagai landasan berpijaknya.

Ilmu pendidikan, secara epistemologis telah memiliki dasar yang kuat untuk dijadikan basis pemecahan masalah pendidikan. Ilmu pendidikan memiliki langkah-langkah yang bersifat sistemik dalam memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan secara mendasar dapat dilihat dalam konteks ilmu, kebijakan, dan juga perilaku. Dalam berbagai hal, memecahkan masalah pendidikan kerap hanya dilihat dalam konteks kebijakan dan perilaku. Sehingga terkesan mengabaikan pendidikan dalam konteks ilmu.

Kebijakan tentang pendidikan memiliki keterbatasan terkait dengan paradigma pengambil kebijakan, sedangkan dalam konteks perilaku, cenderung merupakan lanjutan sikap atas kebijakan yang dikeluarkan tentang pendidikan dan menjadi kebiasaan manajemen pendidikan. Tetapi jika menggunakan paradigma ilmu pendidikan secara komprehensif, akan ditemukan keputusan yang bersifat sistemik walaupun mungkin akan ditolak atau ditentang sebagian masyarakat pemangku kepentingan pendidikan.

B. REKONSTRUKSI PENDIDIKAN BERBASIS ILMU PENDIDIKAN

Jika ditelaah secara komprehensif, masalah pendidikan di Indonesia saat ini adalah karena mengabaikan ilmu pendidikan sebagai basis dalam mengambil kebijakan. Cenderung berbagai hal tentang pendidikan hanya dilihat sebagai bagian dari masalah-masalah lainnya, sehingga pendidikan dianggap sebagai sub sistem dalam sistem yang lebih besar. Adakalanya pandangan ini tidaklah salah sama sekali, tetapi jika ditelaah secara mendasar, pandangan ini sangat sempit dalam melihat masalah pendidikan sehingga tidak menyelesaikan masalah pendidikan secara menyeluruh dan utuh.

Sebagai contoh yang cukup aktual saat ini adalah masalah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan juga masalah karya ilmiah calon sarjana Program Strata 1, 2, dan 3 yang diharuskan dimuat dalam Jurnal Ilmiah di Perguruan Tinggi. Jika ditelaah secara mendasar, kedua masalah yang sedang aktual ini bukanlah pemecahan

masalah dengan menggunakan pendekatan atau berbasis ilmu pengetahuan, tetapi cenderung hanya berbasis kebijakan semata, atau hanya semata terkait dengan perilaku dalam mengambil kebijakan atau keputusan.

Ilmu pendidikan adalah sebuah ilmu yang telah memiliki syarat untuk dapat dikatakan sebagai ilmu, ia memiliki materi, metode, atau juga cara kerja yang memungkinkan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh Mulkhan (1993:56) dalam konteks filsafat, sebuah ilmu itu haruslah memiliki realitas, eksistensi, esensi, substansi, dan persoalan mengenai materi dan bentuk.

Ilmu pendidikan jika dilihat secara komprehensif memiliki realitas, eksistensi, esensi, substansi, dan juga materi serta bentuk. Karenanya, masalah pendidikan pada saat ini sebenarnya jika ditelaah secara mendasar terkait dengan realitas, eksistensi, esensi, substansi, materi dan bentuk. Dalam konteks realitas, pendidikan adalah sebuah keniscayaan yang menjadi kebutuhan dan bersifat fungsional dalam sistem hidup dan kehidupan manusia, karenanya semua orang butuh pendidikan.

Substansi pendidikan pada dasarnya adalah upaya memanusiakan manusia oleh manusia yang telah memanusia. Proses memanusiakan manusia dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aspek-aspek kelaziman kemanusiaan manusianya. Seperti bakat, minat, potensi, cita-cita, dan lain-lainnya sehingga akan menghasilkan lulusan pendidikan yang memiliki kesadaran untuk memerankan diri secara proporsional. Jika substansi pendidikan itu dapat diterapkan akan menghasilkan lulusan yang memiliki karakter diri yang kuat dan tidak mudah terpengaruh melakukan sesuatu yang bersifat anomali atau juga penyimpangan dari jati dirinya.

Materi dan bentuk pendidikan tentu saja terkait dengan program studi atau program pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sebagai pemangku kepentingan pendidikan. Materi dan bentuk terkait erat karena akan menentukan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat. Materi pendidikan akan menentukan tujuan kurikuler dalam proses pendidikan dan pembelajaran, sedangkan bentuk pendidikan, terkait dengan minat yang diinginkan seseorang dalam spesifikasi keilmuan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Ilmu pendidikan menjadi sesuatu yang ideal untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan. Apalagi menelaah permasalahan pendidikan pada saat ini di Indonesia yang selalu dikaitkan dengan nilai-nilai yang harus dianut dalam masyarakat. Pendidikan nilai sebagai bagian dari pembentukan karakter pribadi memerlukan pendekatan dan melalui pendekatan ini akan menghasilkan sesuatu yang tepat dalam membantu seseorang membentuk karakter pribadinya.

Muhadjir (1988) dalam Muhaimin (2003:95) mengemukakan pendekatan pembelajaran nilai ke dalam 7 (tujuh) macam: *Pendekatan doktriner* adalah cara menanamkan nilai kepada peserta didik dengan jalan memberikan doktrin dengan penekanan bahwa yang benar itu tidak perlu dipersoalkan dan dipikirkan, tetapi cukup diterima sebagaimana apa adanya secara bulat. *Pendekatan otoritatif* adalah pendekatan yang menggunakan cara kekuasaan, dalam arti nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang datang dari orang yang memiliki otoritas adalah pasti benar dan baik, sehingga perlu diikuti. *Pendekatan action* adalah pendekatan pembelajaran nilai yang melibatkan peserta didik dalam tindakan nyata atau berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui cara tersebut diharapkan muncul kesadaran dalam diri peserta didik akan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. *Pendekatan kharismatik* adalah pendekatan pembelajaran nilai dengan jalan peserta didik melihat dan mengamati kepribadian seseorang yang memiliki konsistensi dan keteladanan yang dapat diandalkan, sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri peserta didik untuk menerima kepribadian orang tersebut sebagai nilai yang benar dan baik. *Pen-dekatan penghayatan* adalah pendekatan dalam pembelajaran nilai yang dikembangkan dengan jalan melibatkan peserta didik dalam kegiatan empirik keseharian, yang lebih menekankan pada keterlibatan aspek afektifnya dari pada aspek rasionalnya, sehingga akan tumbuh kesadaran pada diri peserta didik terhadap nilai kebenaran dan kebaikan. *Pendekatan rasional* adalah cara menanamkan nilai benar dan baik dimulai dari kesadaran rasional, sebab pertumbuhan afek pada diri peserta didik tidak bisa terlepas sama sekali dengan pertumbuhan rasionalnya. *Pendekatan afektif* adalah pendekatan dalam pembelajaran nilai yang menekankan pada proses emosional yang diarahkan untuk menumbuhkan motivasi untuk berbuat.

Merujuk keberbagai pendekatan diatas, dapat dilihat bahwa pendekatan itu bersifat sistemik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian pendekatan untuk membentuk kepribadian atau karakter peserta didik itu, dapat diterima sebagai salah satu pendekatan berbasis ilmu pendidikan dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan pada saat ini, khususnya dalam konteks pendidikan karakter atau pembentukan kepribadian.

Bagaimanapun, nilai-nilai kepribadian adalah sesuatu yang penting untuk ditumbuhkembangkan kepada setiap pesereta didik. Karenanya proses pembelajaran haruslah dilakukan secara efektif sehingga pembentukan kepribadian itu bisa terlaksana. Saat ini perlu dipahami kepada para pendidik dan penyelenggara pendidikan bahwa pembentukan kepribadian peserta didik terkait erat dengan bagaimana proses pendidikan pembelajaran itu dilaksanakan.

Untuk itulah perlu adanya *Accelerated Learning* dalam proses menyelesaikan masalah pendidikan pada saat ini. Meier (2002:74) mengemukakan *Accelerated Learning* karenanya membutuhkan program belajar yang dipusatkan pada pengalaman, bukan yang dipusatkan pada presentasi atau materi. Anda belajar berenang dengan berenang. Anda belajar mengelola dengan mengelolanya. Anda belajar menggunakan komputer dengan menggunakan komputer. Belajar berasal dari melakukan pekerjaan itu sendiri, bukan semata-mata dari membaca tentangnya atau dari mendengar orang lain membicarakannya.

Masalah pendidikan kita saat ini memang mengalami berbagai hal yang cenderung diselesaikan hanya dalam konteks kebijakan yang diiringi dengan pola perilaku yang bersifat permanen. Dikatakan demikian karena hampir dapat dikatakan bahwa masalah pendidikan tidak diobati dengan obat yang didasarkan pada identifikasi dan diagnosis yang telaten dan sempurna. Apalagi dalam konteks evaluasi atas apa yang telah dilakukan, terdapat kecenderungan pembiaran yang mengarah kepada kesalahan yang bersifat struktural sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan perbaikan dan perubahan.

Benchmarking secara teoritis dapat didefinisikan menurut *Westinghouse Productivity & Quality Centre* adalah: “merupakan pencarian dan aplikasi praktek-praktek yang benar-benar lebih baik secara terus-menerus, yang mengarah pada kinerja kompetitif yang

superior". (Watson, 1996:3). Sedangkan menurut *Design Steering Committee dari International Benchmarking Clearinghouse* adalah: "proses pengukuran yang sistematis dan berkesinambungan; proses mengukur dan membandingkan secara sinambung atas proses-proses bisnis suatu organisasi dengan tokoh-tokoh proses bisnis manapun diseluruh dunia, untuk mendapatkan informasi yang akan membantu upaya organisasi tersebut memperbaiki kinerjanya". (Watson, 1996:3).

Tidaklah mudah menerapkan *benchmark* jika tidak ditelaah secara mendasar antara kebutuhan dengan kesesuaian konsep dasarnya. Terdapat kecenderungan yang bersifat sepotong-sepotong dalam menelaah kebutuhan yang harus diterapkan. Keadaan ini bukanlah sesuatu yang bersifat ringan, tetap akan membawa dampak yang cukup berat bagi kelangsungan pendidikan di masa yang akan datang.

Mungkin perlu diingat bahwa hasil dari proses pendidikan yang diterapkan saat ini sebagai sebuah kebijakan antisipatif, selayaknyalah mengingat prinsip *irreversibility*, yaitu suatu sifat atau keadaan yang akan dirasakan hasilnya paling tidak 20 atau 25 tahun yang akan datang terhadap apa yang dilakukan pada saat ini. Prinsip *irreversibility* mengatakan bahwa apa yang kita putuskan dan terapkan pada saat ini akan dirasakan dampaknya pada sekurang-kurangnya 20 atau 25 tahun yang akan datang.

Bukanlah sesuatu yang naif untuk dikatakan bahwa proses pembelajaran yang kita terapkan dengan prinsip pengembangan kurikulum dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan juga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah hasil dari proses *benchmarking* dari negara asing. Semoga saja kedua inovasi kurikulum yang sedang dikembangkan dan dilaksanakan pada saat ini adalah sebagai kebijakan yang tepat dan benar sehingga berdampak positif terhadap pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang kita lakukan.

Namun demikian, perlu kita mengingat bahwa *benchmark* yang kita lakukan dengan mewaspadaikan penyakit pendidikan kebudayaan barat yang cenderung kita tiru atau adopsi dengan berbagai modifikasi. Meier (2002:75) meringkas penyakit pendidikan kebudayaan barat sebagai berikut:

PENYAKIT	GEJALA	OBAT
Puritanisme	Serius, suram, kering, kakau, dan berpusat pada guru.	Belajar yang menggembirakan, mengasuh, dan berpusat pada pembelajar.
Individualisme	Persaingan di antara pembelajar. Keterasingan dan putusnya hubungan.	Kerjasama di antara pembelajar dalam komunitas belajar.
Model Pabrik	Belajar jalur perakitan satu-ukuran untuk-semua. Berdasar waktu dan patuh pada petunjuk.	Prasmanan berbagai pilihan. Berdasar hasil dan kreatif.
Pemikiran Ilmiah Barat	Pendekatan belajar linear, mekanistik, dan terkotak-kotak.	Pendekatan belajar holistik, kontekstual, dan saling berkaitan.
Pemisahan Pikiran/Tubuh	Belajar yang kognitif, verbal, menekankan otak-kiri, dan pasif secara fisik.	Belajar yang memanfaatkan seluruh otak multi-indra, dan aktif secara fisik.
Dominasi Pria	Tekanan pada kontrol, kecerdasan rasional, dan proses berurutan.	Tekanan pada pengasuhan, kecerdasan seluruh otak, dan proses simultan.
Media Cetak	Kata-kata dan konsep abstrak sebagai landasan belajar.	Gambar dan pengalaman konkret sebagai landasan belajar.

Merujuk kepada tabel yang menerangkan penyakit, gejala, dan obat dalam konteks pendidikan diatas, dapat dikatakan bahwa kita harus mewaspadai proses modifikasi ketika melakukan peniruan atau adopsi berbagai *benchmark* yang telah dilakukan. Secara empiris apapun yang telah dilakukan oleh orang lain dengan segala kebaikan dan kearifannya (*best practice*), kita tetap harus memperhatikan kebutuhan kita ketika menerapkannya. Faktor kebutuhan sosial budaya, bahkan politik dan ekonomi harus menjadi perhatian utama sehingga apa yang mereka lakukan secara selektif kita pertimbangkan untuk diadaptasi.

Sebagai negara memerlukan jalan terbaik untuk menemukan jati diri bangsanya melalui proses dan penyelenggaraan pendidikan, proses *benchmarking* adalah sesuatu yang sah dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan yang kita lakukan saat ini telah banyak melakukan perubahan dan pembaruan, apalagi pada saat ini

Amerika Serikat dengan USAIDnya telah banyak memberikan bantuan dengan mengadakan pelatihan dikalangan guru dan manajemen satuan pendidikan. Demikian juga Australia dengan AusAIDnya, yang telah banyak memberikan bantuan pendidikan dan pembelajaran terhadap tenaga kependidikan dan juga manajemen satuan pendidikan.

Kedua lembaga di atas secara praktis telah memberikan bantuan pendidikan, baik dalam bantuan pemberian kebutuhan fisik satuan pendidikan dan juga pelatihan peningkatan kapasitas pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan. Penulis sebagai orang yang terlibat dalam DBE-2 USAID sejak tahun 2006-2010, merasakan betul manfaat bantuan yang diberikan kepada guru dan manajemen satuan pendidikan. Penulis kebetulan adalah pelatih atau instruktur DBE-2 USAID. Banyak sekali ditemukan manfaat dari kegiatan DBE-2 untuk guru dan manajemen pendidikan pada satuan pendidikan di beberapa kota dan kabupaten se-Sumatera Utara.

Pelatihan yang diberikan kedua lembaga tersebut (USAID dan UusAID), telah merubah pola pikir peserta pelatihan sehingga ditemukan adanya perubahan yang signifikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran, dan juga dalam kaitannya bagaimana mengelola satuan pendidikan secara tepat dan benar dengan prinsip demokratis yang berazaskan akuntabilitas sehingga kredibilitas satuan pendidikan menjadi lebih baik dikalangan pemangku kepentingan pendidikan.

C. REFORMASI PENDIDIKAN BERBASIS ILMU PENDIDIKAN

Penyelesaian dari persoalan-persoalan pendidikan tidaklah dapat diatasi dengan cara bagian per bagian. Persoalan-persoalan pendidikan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Artinya bahwa satu persoalan adalah penyebab atau disebabkan oleh sebab-sebab lain. Sebagai contoh, persoalan jeleknya kualitas pengajaran guru di dalam kelas, ternyata berkorelasi positif dengan rendahnya gaji yang mereka terima. Rendahnya gaji yang mereka terima ternyata berkorelasi positif dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting sebuah proses pendidikan bagi perkembangan kehidupan suatu bangsa. Kurangnya kesadaran akan arti penting pendidikan suatu bangsa ternyata berkorelasi positif dengan niat politik para elite untuk memperjuangkan peningkatan anggaran pendidikan. Ketiadaan niat politik ini ternyata berkorelasi positif pula dengan definisi

anggaran pendidikan yang tidak pernah seragam dan begitulah seterusnya. (Bastian, 2002:xiii-xiv).

Merujuk pada kutipan di atas, jika dikaitkan dengan konteks saat ini, dapat dikatakan beberapa hal telah dapat diatasi dengan pendekatan politik pendidikan yang tepat. Dikatakan demikian karena masalah anggaran pendidikan berdasarkan kesepakatan politik pendidikan telah diselesaikan melalui amandemen UUD 1945, dimana salah satu diktum dalam klausul UUD 1945 menyatakan bahwa 20 % anggaran pembangunan diperuntukkan bagi sektor pendidikan.

Amandemen tersebut dalam konteks pembiayaan pendidikan dianggap sudah dapat mengatasi berbagai masalah pendidikan, khususnya untuk kepentingan tenaga kependidikan guru. Apalagi, implikasi dari amandemen UUD 1945 dalam konteks pendidikan, telah meningkatkan kesejahteraan guru. Peningkatan kesejahteraan ini diperoleh oleh guru yang telah disertifikasi sehingga dengan adanya sertifikasi itu pekerjaan sebagai guru menjadi pekerjaan profesional yang berhak mendapatkan tunjangan profesional, yang jumlahnya mencapai 1 (satu) kali lipat gaji pokok, baik untuk guru pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru non PNS. Untuk guru non-PNS akan memperoleh tunjangan profesional setelah mereka memperoleh status kejelasan melalui impasing yang telah menjadi ketetapan pemerintah.

Secara akademik, amandemen UUD 1945 dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan mutu pendidikan pada saat ini dan yang akan datang. Hal ini dapat tercapai jika seluruh komponen bangsa dapat menerjemahkan secara cerdas makna yang terkandung dengan adanya amandemen UUD 1945 dalam konteks pendidikan dan kaitannya dengan kesiapan bangsa menuju bangsa yang kuat, mandiri, dan disegani oleh negara-negara lainnya.

Amandemen UUD 1945 tersebut, sampai saat ini membawa dampak positif, walaupun masih ada pihak yang mempertanyakan kebutuhan dengan diamandemennya UUD 1945 itu. Adanya kesamaan pandangan politik dalam mengamandemen UUD 1945 pada dasarnya terkait dengan bagaimana wawasan kebangsaan dalam melihat kesiapan bangsa yang sangat besar ini menghadapi persaingan global yang sangat kuat dan kental dengan mutu sumber daya manusia. Tidak ada kata atau terminologi yang begitu mendesak untuk diperhatikan selain kata atau terminologi persaingan. Hampir dapat

dipastikan bahwa bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi dan bermutualah yang akan mampu memenangkan pertarungan pengaruh dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang produk ilmu yang menjadi andalan utama, dan bukannya menitik beratkan pada sumber daya alam semata.

Berkaitan dengan kegalauan yang dirasakan masyarakat pada saat ini, terutama masyarakat yang sangat cinta dengan dunia pendidikan, sangat mengharapkan agar pendidikan dikelola secara cerdas dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan pendidikan, sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat secara penuh dan tahu persis kemana pendidikan ini akan di bawa.

Berbagai persoalan yang terjadi dalam kaitannya dengan pendidikan, haruslah dilakukan pemecahan masalah secara menyeluruh. Perguruan Tinggi dalam kaitan ini harus dilibatkan karena memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan dengan kekuatan etik dan moral yang dimilikinya. *World Declaration of Higher Education* pernah mengungkapkan tentang peran etik, otonomi, tanggungjawab dan fungsi antisipatif perguruan tinggi. Dalam hal ini Perguruan Tinggi berkewajiban sebagai berikut:

1. Memelihara dan mengembangkan fungsi-fungsi krusialnya melalui penegakan etik dan keteguhan ilmiah dan intelektual melalui berbagai aktivitasnya.
2. Mampu berbicara lantang dan tegas tentang masalah-masalah etik, kebudayaan dan sosial secara independen dan, dengan kesadaran penuh tentang tanggungjawabnya; menegakkan otoritas intelektual yang diperlukan masyarakat dalam berefleksi, memahami, dan bertindak.
3. Memperkuat fungsi-fungsi kritis dan berorientasi ke masa depan (*future oriented*) melalui analisis yang berkelanjutan tentang kecenderungan-kecenderungan perubahan dan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sedang tumbuh; dan sekaligus memberikan focus bagi prediksi, peringatan dan pencegahan.
4. Menegakkan kapasitas intelektual dan prestise moralnya untuk membela dan secara aktif menyebarkan nilai-nilai yang telah diterima secara universal, termasuk perdamaian, keadilan, ke-

- bebasan, kesetaraan, dan solidaritas, seperti disinggung dalam Konstitusi UNESCO.
5. Menikmati kebebasan dan otonomi akademis, seperti terlihat dalam hak-hak dan kewajiban, sementara tetap bertanggungjawab sepenuhnya (*fully responsible*) dan *accountable* kepada masyarakat.
 6. Memainkan peran dalam membantu mengidentifikasi dan menjawab masalah-masalah yang mempengaruhi kesejahteraan berbagai komunitas, bangsa, dan masyarakat global. (Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, 2000).

Bagaimanapun, sulit untuk mengingkari peran perguruan tinggi dalam reformasi pendidikan, walaupun perguruan tinggi itu juga merupakan bagian yang harus melakukan reformasi dalam tubuhnya. Perguruan tinggi dengan kekuatan sumber manusia yang dimilikinya dapat melakukan perubahan secara sistemik karena nuansa akademik yang menjadi cirinya berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Perguruan Tinggi yang memiliki tenaga akademik atau ilmuan terbiasa bekerja dengan paradigma ilmu yang berorientasi kepada kebenaran, kejujuran, dan bertindak secara adil.

Dalam paradigma ilmu, ilmuan telah mengembangkan sejumlah perangkat keyakinan dasar yang mereka gunakan dalam mengungkapkan hakikat ilmu yang sebenarnya dan bagaimana cara untuk mendapatkannya. (Salim, 2001). Mengacu kepada paradigma ilmu yang cenderung mengungkapkan sesuatu secara hakiki cara mendapatkan kebenaran, baik kebenaran filosofis dan metodologis, maka perguruan tinggi memiliki peran yang cukup besar dalam mereformasi pendidikan secara menyeluruh.

Pengembangan paradigma keilmuan intelektual, selayaknya harus mengacu kepada aspek filosofis dan metodologi keilmuan masing-masing. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma diartikan sebagai: (a) *A set of assumptions*, (b) *beliefs concerning*; yaitu asumsi yang “dianggap benar” (secara *given*). Dengan demikian, paradigma dapat dikatakan sebagai *A mental window*, tempat terdapat “*frame*” yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya karena masyarakat pendukung paradigma telah memiliki kepercayaan. (Salim, 2001: 33-34). Lebih lanjut Agus Salim mengemukakan, pengembangan paradigma ilmu harus dapat

menjawab aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dimensi aksiologis, dimensi retorik dan dimensi metodologis.

1. Dalam dimensi ontologis, pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang ilmuwan adalah: Apa sebenarnya hakikat dari sesuatu yang dapat diketahui (*knowable*), atau apa sebenarnya hakikat dari suatu realitas (*reality*).
2. Dalam dimensi epistemologis, pertanyaan yang harus dijawab oleh seseorang adalah: Apa sebenarnya hakikat hubungan antara pencari ilmu (*inquirer*) dan objek yang ditemukan (*known* atau *knowable*).
3. Dalam dimensi aksiologi yang dipermasalahkan adalah peran nilai-nilai dalam suatu kegiatan penelitian.
4. Dalam dimensi retorik yang dipermasalahkan adalah bahasa yang digunakan dalam penelitian.
5. Dalam dimensi metodologis, seorang ilmuwan harus menjawab pertanyaan: bagaimana cara atau metodologi yang dipakai seseorang dalam menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan.

Jelas sekali bahwa peran paradigma dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan adalah sebuah keniscayaan karena akan memberikan perubahan yang bersifat signifikan dalam dunia pendidikan saat ini. Perubahan paradigma melalui reformasi yang dilakukan saat ini tidak dapat dihindari, ia merupakan suatu kebutuhan dan harus dilaksanakan secara terus menerus sesuai dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan inilah yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan paradigma. Perubahan paradigma yang dilakukan tentu saja harus sejalan dengan prinsip-prinsip ilmu.

Adakalanya orang selalu bertanya, mengapa untuk menyelesaikan masalah harus dengan ilmu? Pertanyaan ini bukan tidak berdasar sama sekali. Mengapa masalah pendidikan harus diselesaikan dengan Ilmu Pendidikan? Mungkin jawabannya tidaklah sulit. Bisa saja dijawab karena Ilmu Pendidikan memiliki cara kerja atau metode tersendiri, yang otomatis cara kerja atau metodenya haruslah dengan Ilmu Pendidikan, karena Ilmu Pendidikan sudah pasti memiliki cara kerja yang sistemik sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu.

Ilmu pengetahuan adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan bersifat fungsional bagi hidup dan kehidupan manusia. Ilmu merupakan penerang jalan bagi manusia sehingga memudahkannya mencapai tujuan. Ungkapan berikut ini merupakan wujud pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, yang diambil dari buku La Tahzan (Jangan Bersedih) oleh Al-Qarni, (2005:63-64) beliau mengemukakan:

1. Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan dan membusuknya umur.
2. Ilmu adalah cahaya bagi nurani, kehidupan bagi ruh dan bahan bakar bagi tabiat.
3. Kebahagiaaan, kedamaian, dan ketenteraman hati senantiasa berawal dari ilmu pengetahuan. Itu, karena ilmu pengetahuan mampu menembus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang, dan menyingkap yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik.
4. Kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang menarik dan segar; yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari inipun sama dengan yang akan terjadi esok hari.
5. Bila anda ingin senantiasa bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah pelbagai manfaat, niscaya semua kesedihan, kepedihan dan kecemasan itu akan sirna.
6. Janganlah seseorang sombong dengan harta atau kedudukannya, kalau memang ia tak memiliki ilmu sedikitpun. Sebab, kehidupannya tidak akan sempurna.
7. Alangkah mulianya ilmu pengetahuan, alangkah gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, alangkah segarnya dada orang yang penuh dengannya, dan alangkah leganya perasaan orang yang menguasainya.

Sungguh suatu pemikiran yang cerdas dalam menjelaskan peran ilmu dalam hidup dan kehidupan manusia sebagaimana tertera pada kutipan di atas. Adalah suatu kenyataan yang bersifat empiris bahwa hidup dan kehidupan manusia akan semakin cerah jika ilmu pengetahuan menjadi jalan penerang. Demikian juga halnya dengan

berbagai hal yang terkait dengan kepentingan manusia seperti pendidikan.

Memecahkan masalah pendidikan memang harus dengan Ilmu Pendidikan. Pada saat ini untuk meningkatkan mutu pendidikan, dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan amanah amandemen UUD 1945 terkait dengan sektor pendidikan. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dengan melakukan akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk mengukur dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan (sekolah/madrasah/pesantren). Sedangkan sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan mutu sekaligus secara simultan meningkatkan kesejahteraan guru yang telah disertifikasi dan memperoleh prediket guru profesional.

Kedua kegiatan itu (akreditasi dan sertifikasi) menjadi kegiatan yang terkait erat dengan bagaimana mereformasi pendidikan berdasarkan telaah ilmiah. Dikatakan demikian karena akreditasi dan sertifikasi merupakan keputusan ilmiah dengan melibatkan kegiatan dengan prinsip-prinsip ilmiah. Setidak-tidaknya objek dan subjek keduanya (akreditasi dan sertifikasi) dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Sampai saat ini kedua kegiatan itu masih berlangsung dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada padanya.

Tetapi yang jelas, bahwa kampanye akreditasi telah berhasil meningkatkan kemampuan dan kesadaran satuan pendidikan untuk berorientasi kepada mutu penyelenggaraan pendidikan. Hampir dapat dipastikan bahwa kampanye akreditasi telah memaksa satuan pendidikan (sekolah/madrasah/pesantren) untuk sadar agar menyelenggarakan pendidikan yang kredibel dan akuntabel sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan itu.

Masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan sudah merasakan implikasi akreditasi secara positif. Walaupun tentu saja masih terdapat sebagian satuan pendidikan yang tidak secara konsisten memenuhi aspek-aspek atau komponen-komponen yang terdapat dalam akreditasi. Sebagaimana diketahui bahwa aspek-aspek yang terdapat dalam komponen akreditasi mencapai 8 (delapan) standar nasional pendidikan.

Seluruh komponen dari standar nasional pendidikan jika ditelaah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan oleh setiap satuan pendidikan (sekolah/madrasah/pesantren). Setiap komponen memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan bersifat mendukung satu sama lainnya. Tidak akan sempurna sebuah satuan pendidikan dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran jika hanya menitik beratkan pada satu komponen saja. Akan terjadi kepincangan yang merugikan satuan pendidikan dan warga masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan jika komponen-komponen itu tidak terpenuhi secara menyeluruh.

Arah yang dituju dari proses akreditasi ini adalah supaya layaknya satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan secara komprehensif. Seluruh komponen yang terdapat dalam standar nasional pendidikan itu akan mengarahkan satuan pendidikan dalam bekerja dari hari kehari dengan segala konsekuensi yang mengikut di dalamnya. Jika satuan pendidikan itu dapat memenuhi seluruh item dalam komponen itu, dapat dipastikan satuan pendidikan itu menjadi alternatif utama masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, tetapi jika tidak terpenuhi maka satuan pendidikan itu tidak menjadi alternatif utama.

Fakta menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A, yaitu akreditasi dengan nilai tertinggi cenderung menjadi pilihan utama warga masyarakat. Sedangkan dengan nilai B ataupun C menjadi pilihan berikutnya. Sedangkan yang tidak terakreditasi akan sulit untuk mengembangkan diri dan biasanya masyarakat akan menghindarinya untuk dijadikan sebagai alternatif. Dengan demikian, kampanye akreditasi telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya satuan pendidikan yang bermutu karena dapat memenuhi tujuan standar nasional pendidikan.

Sesama Pengawas Pendidikan ini biasanya melakukan pendekatan agar tidak menjatuhkan nilai rendah kepada satuan pendidikan yang diperiksanya. Situasi yang tidak sehat ini selalu berlangsung walaupun sudah dilakukan proses pelatihan dan memberikan penjelasan tentang kode etik kepada mereka. Situasi psikologis ini sampai saat ini masih sulit diatasi, tetapi mudah-mudahan pada saatnya nanti akan terjadi kesadaran yang menyeluruh dikalangan pengawas untuk dapat bertindak objektif dalam melakukan penilaian ketika bertugas sebagai asesor di satuan pendidikan.

Terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru sebagai bagian dari reformasi pendidikan berbasis ilmu pendidikan, sampai saat ini memang proses dan hasil sertifikasi itu masih selalu diperdebatkan. Namun, jika di lihat secara faktual, sertifikasi telah berhasil meningkatkan kesadaran guru untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip profesionalitas. Prinsip profesionalitas inilah yang harus tetap menjadi budaya kerja guru sebagai bagian dari pengabdian sebagai tenaga kependidikan untuk mencerdaskan peserta didik.

Secara ekonomis para guru yang telah tersertifikasi dan menerima tunjangan sertifikasi telah memperoleh tambahan pendapatan yang berarti dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Keadaan ini akan meningkatkan rasa percaya diri guru untuk melaksanakan tugas di satuan pendidikan dan juga dimasyarakatnya, walaupun tunjangan sertifikasi itu diperoleh per enam bulan atau per satu semester. Rasa percaya diri yang meningkat ini diharapkan akan mempengaruhi motivasinya untuk melakukan proses pendidikan dan pembelajaran secara maksimal dan optimal.

Memang masih ada sebagian pihak yang mempertanyakan proses sertifikasi itu apakah akan meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaan itu terkait dengan rasa kritis masyarakat akan arti penting pendidikan bagi diri dan keluarganya. Apalagi biaya yang dikeluarkan pemerintah sebagai implikasi dari sertifikasi itu cukup besar dan mempengaruhi anggaran belanja negara.

Namun, jika ditelaah secara menyeluruh, sertifikasi itu telah mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokoknya. Guru sebagai tenaga kependidikan telah disadarkan untuk berkinerja secara maksimal karena telah mendapatkan *reward* atau kompensasi yang cukup besar secara ekonomi jika dibandingkan sebelum di sertifikasi. Walaupun terdapat sebagian guru belum menyadari arti *reward* tersebut, diharapkan melalui kampanye yang dilakukan secara terus menerus akan muncul kesadaran yang menyeluruh dikalangan guru sehingga berimplikasi luas terhadap mutu guru.

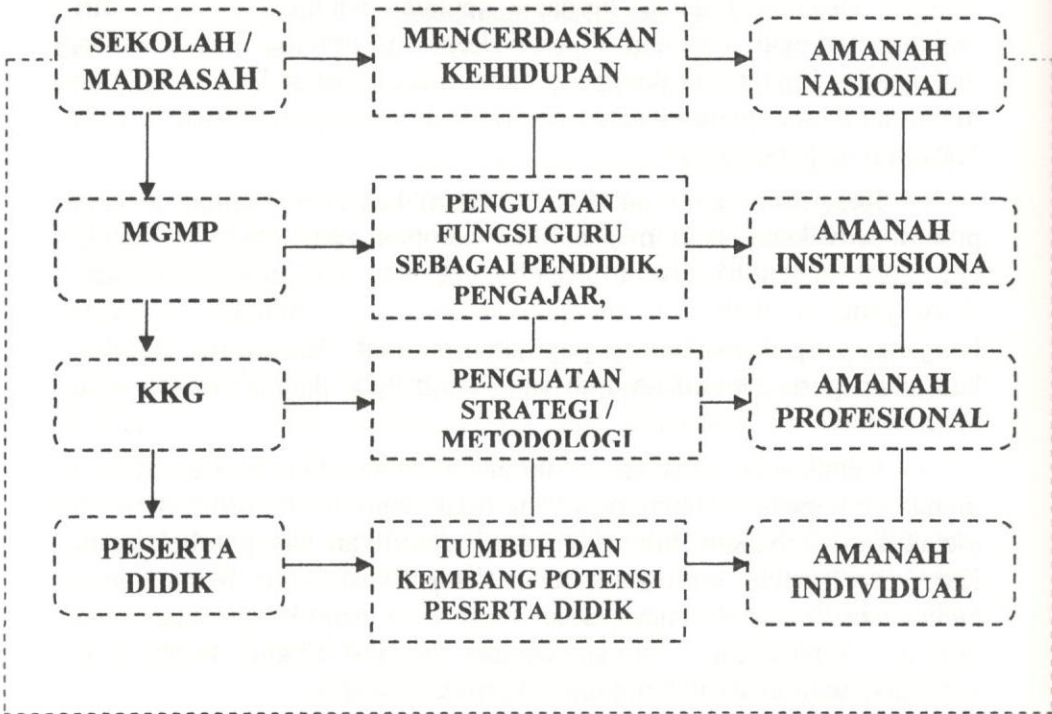
Jika guru mengabaikan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan pelatih, patut dikatakan bahwa guru itu tidak layak sebagai guru dan dapat di anggap sebagai pengkhianat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, setelah guru di sertifi-

kasi, ia harus aktif dalam berbagai kegiatan peningkatan mutu diri melalui berbagai kegiatan. Seperti kegiatan ilmiah, ikut seminar, diskusi, dan juga melakukan penelitian tindakan kelas (PTK). Dan jika memungkinkan meningkatkan pendidikan ke jenjang Strata 2 (S2) bahkan juga Strata 3 (S3).

Keseriusan guru untuk ikut dalam kegiatan lanjutan setelah proses sertifikasi, akan memberikan dampak yang positif terhadap citra guru itu sendiri sebagai pribadi yang mau melakukan perubahan. Guru yang berubah akan menjadikan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukannya juga akan berubah. Karenanya, perubahan sikap guru menuju ke arah yang lebih baik akan dirasakan oleh peserta didik.

Kegelisahan masyarakat terhadap proses dan hasil sertifikasi mengarah kepada perilaku guru yang tidak dapat secara terus menerus melakukan perbaikan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Karenanya, setiap guru yang telah disertifikasi harus beranggapan bahwa sertifikasi itu merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan kepada guru, sehingga dengan apresiasi itu guru secara terus menerus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional itu dapat dilakukan guru melalui berbagai kegiatan dalam wadah KKG atau MGMP. Kedua wadah ini akan lebih efektif memelihara dan meningkatkan kemampuan profesional setiap guru baik yang sudah maupun yang belum di sertifikasi. Bagi guru yang telah selesai mengikuti sertifikasi melalui berbagai jalur, selayaknyalah aktif dalam kegiatan yang dapat menjamin terciptanya kesinambungan profesionalitas guru tersebut. Oleh karenanya, guru harus aktif dalam kegiatan paguyuban guru seperti dalam kegiatan kelompok kerja guru (KKG) dan juga dalam musyawarah guru mata pelajaran (MGMP). Kedua kegiatan ini merupakan wadah yang cukup efektif jika dimanfaatkan secara maksimal. Untuk jelasnya bagaimana guru memanfaatkan KKG dan MGMP dalam menjamin keberlangsungan keprofesionalannya dapat dilihat pada skema yang dikemukakan oleh Siahaan dan Liuz Zen (2011:125) sebagai berikut ini:



Skema di atas menggambarkan perlunya guru yang telah di sertifikasi untuk setiap saat memanfaatkan KKG dan MGMP sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas diri sehingga keprofesionalan guru itu tetap terjamin. Tanggungjawab memanfaatkan KKG dan MGMP memang bukan hanya menjadi tanggungjawab guru, tetapi juga menjadi tanggungjawab pengawas pendidikan dan juga kepala sekolah/madrasah. Ketua atau pengurus KKG dan MGMP pun perlu dilengkapi sarana dan prasarana atau pendanaan yang tepat sehingga KKG dan MGMP dapat hidup dan bergerak ke arah yang profesional untuk mendukung pencapaian guru-guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan juga pelatih.

Hanya saja akhir-akhir ini terdapat fenomena yang tidak sehat dan menyedihkan dikalangan guru, bagi mereka (guru) yang telah menyelesaikan pendidikan di S2 atau S3 ingin beralih menjadi dosen di perguruan tinggi. Cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir sesat dalam konteks peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Jelas sekali bahwa guru seperti ini tidak menyadari arti dirinya sebagai tenaga pendidikan guru.

Terdapat kesan yang sangat keliru dikalangan guru bahwa jika berhasil pindah mutasi menjadi dosen akan meningkatkan gengsi dan harga diri yang tinggi. Padahal kemuliaan sebagai guru adalah relatif sama dengan kemuliaan sebagai dosen. Apalagi kedua-duanya adalah akademisi yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan dan meningkatkan mutu sumber daya peserta didik. Sepertinya, terdapat kesan yang keliru dikalangan guru, bahwa menjadi dosen adalah pekerjaan yang lebih enak dan dapat meningkatkan harga diri di masyarakat. Padahal dengan adanya sertifikasi guru, pekerjaan profesional sebagai guru sangatlah menjanjikan.

Selayaknyalah setiap guru yang ingin dan berniat pindah mutasi menjadi dosen, mengurungkan niatnya dan jadikanlah profesi sebagai guru adalah panggilan hati nurani dan sekaligus merupakan takdir Tuhan. Jika ini dilakukan maka dapat dipastikan satuan pendidikan akan memiliki tenaga kependidikan guru yang berkualitas, guru dengan kemampuan yang tinggi melaksanakan proses pendidikan pembelajaran sehingga berimplikasi luas terhadap produk pendidikan.

D. PENUTUP

Menyelesaikan masalah pendidikan selayaknyalah dengan Ilmu Pendidikan, tidak akan terjamin masalah pendidikan terpecahkan secara mendasar atau menyeluruh jika Ilmu Pendidikan diabaikan. Dalam kaitan ini, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga para pengambil keputusan tentang pendidikan, harus kembali kepada Ilmu Pendidikan.

Sebagai ilmu, Ilmu Pendidikan telah memiliki cara kerja atau metode yang teruji dalam menyelesaikan masalah pendidikan. Karenanya, kebijakan apapun yang terkait dengan pendidikan selayaknya menjadikan Ilmu Pendidikan sebagai instrumen pemecah masalah. Disamping melibatkan Ilmu Pendidikan dalam menyelesaikan masalah pendidikan, aspek-aspek manajemen dalam mengelola pendidikan harus disempurnakan berdasarkan kebutuhan perubahan dan peningkatan mutu manajemen, dengan demikian, Ilmu Manajemen

juga menjadi hal yang perlu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pendidikan.

Amiruddin Siahaan, lahir di Tanjung Balai, 06 Oktober 1960 merupakan Dosen tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, sebagai Lektor Kepala (IV/c) dengan keahlian Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (MLPI). Saat ini sebagai Pembantu Dekan III. S1 (1988) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fak. Tarbiyah IAIN-SU, S2 (2000) Prodi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP), Kandidat Doktor Program Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

Nurhidayah, Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) SMP Negeri 11 Medan, Alumni Strata-2 Program Pascasarjana IAIN SU.

DAFTAR BACAAN

- Abdul Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim*, (1993), Yogyakarta, Sypress.
- Aidh al-Qarni, (2005), *La Tahzan*, Jakarta, Qisthi Press.
- Agus Salim, (2001), *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Amiruddin Siahaan dan Wahyuli Lius Zen, (2011), *Paradigma Baru Administrasi Pendidikan*, Bandung, Citapustaka Media Perintis.
- Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan*, (2002), Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Dave Meier, *The Accelerated Learning*, (2002), Bandung, Kaifa.
- Gregory H Watson, (1996), *Strategic Benchmarking*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo, (2000), *Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (2003), Bandung, Nuansa.

Jurnal Dakem

Pendidikan dan Humaniora



ISSN 2085-496X

9 772085 496016